

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aturan ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, telah mengatur sistem ekonomi dengan teliti melalui nilai-nilainya yang Universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi (*muamalah*) harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama (*sharing*) ataupun semua aspek ekonomi. Indikasinya bisa dilihat dari dibolehkannya sistem barter (materi dan manfaat), baik melalui jual beli, sewa menyewa, pengadaan, kerja sama dan lainnya. Islam juga telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan transaksi ekonomi (selama tidak melanggar nilai-nilai universal islam) bahkan menyuruh untuk terus dinamis dalam menciptakan kemudahan transaksi melalui beberapa instrumen agar selalu *update* dan *valid* dengan perubahan waktu dan tempat. Disamping itu juga, meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat Islam terhadap hukum Islam.

Beberapa tahun belakangan ini pengkajian, pemikiran, dan diskusi tentang ekonomi Islam semakin sering terjadi, dan hal ini berpengaruh besar terhadap sistem ekonomi syariah pada umumnya dan lembaga keuangan syariah pada khususnya. Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan

adalah salah satu alat yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi. Begitu pula dengan lembaga keuangan syariah, dimana lembaga inilah yang menjadi salah satu alat dalam penegakkan aturan-aturan Islam yang akan memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat, penciptaan iklim bisnis yang lebih baik dan lepas dari praktek kecurangan. Pengaruh tersebut terlihat pada meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk Bank ataupun non Bank. Sampai dengan 30 September 2007 PT. Bank Riau Kepri terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 19 kantor cabang konvensional, 14 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas dan *Payment Point* dan 8 layanan Syariah yang tersebar di seluruh Kabupaten dan kotamadya di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Bank Riau Kepri adalah lembaga perbankan konvensional yang sudah menerapkan sistem syariah. Bank Riau Kepri syariah mulai menjalankan aktifitas perbankannya mulai dari tanggal 1 Juli 2004. Sebagai salah satu bank yang menjalankan aktifitasnya berdasarkan syariah islam, tentu saja Bank Riau Kepri Syariah ini memiliki perbedaan dengan bank konvensional lainnya.

Menurut (Kasmir, 2003; 37) perbedaan bank konvensional dengan Bank Syariah adalah berdasarkan prinsip kerjanya, lembaga keuangan Bank dibedakan menjadi dua macam, yaitu lembaga Bank berdasarkan prinsip Konvensional dan lembaga Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan operasional pada Bank Syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan

penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa perbankan lain yang disediakan oleh Bank Syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan karena dari situlah perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Didalam Bank Syariah terdapat beberapa produk yang di tawarkan, Produk yang ditawarkan salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dengan Bank dalam pembagian keuntungannya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati pada saat akad. Pembiayaan *mudharabah* berbeda dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Konvensional. Pada pembiayaan *mudharabah* diterapkan keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai *debitor* dengan *kreditor* saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank. Muamalah diartikan sebagai kegiatan jual beli, utang piutang, dan sebagainya (Jasman, 2004; 22).

Pembiayaan *mudharabah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan

sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan Informasi Akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara Bank Syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan *depositor*.

Pada saat akad penyaluran pembiayaan *mudharabah* harus terdapat kepastian mengenai persentase perolehan hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai. Bank harus menetapkan mekanisme perhitungan yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan usaha yang kesemuanya lebih merupakan kebijakan bisnis bank yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berbeda dari tiap-tiap Bank Syariah. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan Akuntansi Konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan *mudharabah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Dengan terbitnya PSAK No. 101-106 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, telah membawa era baru bagi Industri keuangan di Tanah Air yang berprinsip syariah. PSAK No. 101-106 telah menjadi peraturan dan standar yang baku bagi operasional

perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan dan perbankan syariah.

Pembiayaan *Mudharabah*, yang merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil, bisa dimungkinkan pula telah mengalami perubahan perlakuan Akuntansi akibat diberlakukannya PSAK No. 105 Tahun 2007 tentang Akuntansi Mudharabah tersebut. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghsilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musyarakah.

Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru merupakan Usaha Unit Syariah Bank Syariah, dimana salah satu pendapatannya berasal dari pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hasil wawancara penelitian pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, dalam perlakuan akuntansi dan pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105, dan berdasarkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah Bank Riau Kepri Syariah, maka ditemukan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam pembagian bagi hasil mereka berdasarkan dari total pendapatan usaha pada periode tersebut. Seharusnya dari pihak Bank Riau Kepri Syariah membagi hasil usahanya berdasarkan laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Menurut PSAK No. 105 paragraf 11 “pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*”.
2. Pada PSAK No. 105 paragraf 25 di jelaskan bahwa “dana yang di terima dari pemilik dana dalam akad diakui sebagai dana syirkah temporer”. Didalam Pos Neraca yang dibuat oleh pihak Bank Riau Kepri Syariah tercatat sebagai dana investasi tidak terikat, dimana pada PSAK No. 101 pada format neracanya dicatat sebagai dana syirkah temporer dan dana syirkah temporernya dibagi menjadi dua yaitu dana syirkah temporer dari bukan Bank dan dana syirkah temporer dari Bank dan kedua dana tersebut dipisahkan dalam pencatatannya, sedangkan pada Bank Riau Kepri Syariah antara dana syirkah temporer yang dari bukan Bank dan dari Bank di gabungan menjadi satu. Seharusnya pihak Bank Riau Kepri memisahkan antara dana syirkah temporer dari bukan Bank dan dari

Bank sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

3. Didalam laporan neraca perusahaan tidak memasukkan pinjaman qardh kedalam pos aset, seharusnya perusahaan memasukkan kedalam laporan neraca karena akan menambah aset.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup terbatas dalam pembahasan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO.101 DAN NO.105 (Studi Kasus Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini adalah: “Apakah Penerapan Akuntansi Syariah (PSAK No.101 dan No.105) yang diterapkan **Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru** telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan?”.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi Syariah pada Bank Riau Syariah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas Wawasan Penulis dan dapat menambah pengalaman dan mempraktekkan Ilmu dan Teori yang penulis dapat di bangku kuliah khususnya menyangkut masalah Penerapan Akuntansi syariah.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bagi Bank Riau Kepri Syariah, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman maupun pelengkap terhadap berbagai pengetahuan di bidang perbankan syariah.
4. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan *referensi* dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 6 Januari 2013 sampai dengan selesai.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa jenis data beserta sumbernya, sebagai pedoman peneliti menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut (Kuncoro, 2003; 127) bahwa data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data *original*. Data primer penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari pihak Bank Riau Syariah dengan mengajukan pertanyaan secara sistematis.

b. Data Skunder

Menurut (Kuncoro, 2003; 127) bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yaitu data yang telah diproses yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu seperti laporan keuangannya. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Riau Kepri Syariah.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, metode yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Menurut (Narbuko, 2009; 83) bahwa wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.

Sedangkan menurut (Nasution, 2011; 127) wawancara berguna sebagai pelengkap metode pengumpulan data lainnya.

Jadi, wawancara dapat dilakukan dengan bertatap muka dan berbicara secara langsung kepada pihak-pihak yang memberikan opini tentang permasalahan yang akan dibahas.

2. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.4.4 Analisis Data

Analisis Data menurut (Sekaran, 2006; 175) merupakan tahap untuk menemukan permasalahan yang mungkin terdapat didalam data tersebut setelah data berhasil dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data analisis deskriptif. Menurut (Rahimsyah, 2009; 120) menyatakan dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa analisis deskriptif yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang sesuatu sesuai kenyataan yang ada. Sehingga dengan analisis deskriptif ini dapat dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi data, selanjutnya menganalisis tata cara serta penyajian laporan hasil penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan permasalahan di atas maka penulis menyusun dan mengelompokkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum perusahaan, yakni mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi Mudharabah, penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kewajiban, akuntansi Mudharabah, dan penyajian laporan keuangan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan dan penelitian ini.